



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN NGANTANG  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngantang Tahun 2018
BAB III	Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ngantang
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Ngantang Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 23 Juli 2019

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 23 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 13 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN  
NGANTANG KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Ngantang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat



Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Rencana Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

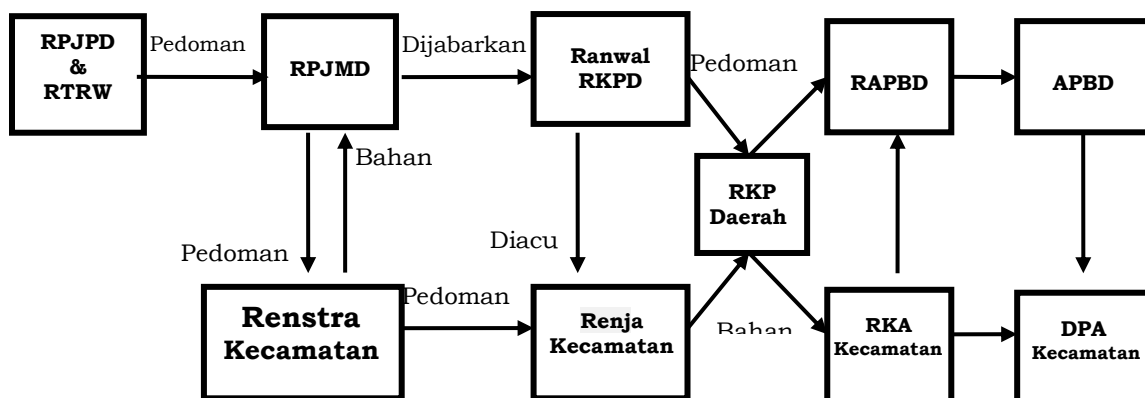
Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Ngantang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 16 Nopember 2018, Nomor: 050/7534/35.07.202/2018, perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, surat Edaran Bupati Malang, tanggal 8 Februari 2019, Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dan tanggal 1 Maret 2019, Nomor: 050/1371/35.07.202/2019, perihal Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ngantang menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020. Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ngantang menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan rencana kerja dan pendanaan indikatif.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Ngantang berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Ngantang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngantang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

### **KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Tahun 2020 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ngantang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ngantang Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ngantang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/974/KEP/35.07.013/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/569/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/225/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Tahun 2020.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ngantang tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

**BAB II: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN NGANTANG  
TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rancangan Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ngantang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngantang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngantang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGANTANG.**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ngantang
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN  
NGANTANG**

**BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN NGANTANG**  
**TAHUN 2018**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ngantang**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Ngantang melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan, tingkat capaian kinerja program dan kegiatan sampai akhir Tahun 2018 mencapai 100%. Kegiatan yang telah terlaksana adalah Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindaklanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala sehingga pada akhir tahun dapat tercapai 100%, ditunjang dengan adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas camat antara lain adalah melakukan pembinaan 6 desa se Kecamatan Ngantang dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 13 Desa, dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun tercapai 100%.
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan monitoring bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
4. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,



terutama dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangcam dan kegiatan fasilitasi tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, saat ini berjalan lancar tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai melebihi target yaitu 100%.

Tahun 2019 Kecamatan Ngantang melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2019 diperkirakan dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan diperkirakan tercapai 100%. Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tribulan pertama tahun 2019 adalah rata-rata 48%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya Perubahan/Review RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, sehingga indikator dan target kinerja 2016-2021 disesuaikan sehingga capaian dapat diakumulasikan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Ngantang dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ngantangs/d Tahun 2019**  
**Kecamatan Ngantang**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
<b>1.</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/ air bersih, komunikasi dan internet (bulan)	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	3 Kegiatan	7 Kegiatan	70
1.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	3 Kegiatan	5 Kegiatan	100
1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	30 bulan	54 bulan	90
1.4	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	10 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	6 Kegiatan	8 Kegiatan	80
1.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanandan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	3 Kegiatan	5 Kegiatan	100
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Jenis)	10 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	5 Kegiatan	7 Kegiatan	70

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1.7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas keluar Daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	21 bulan	45 bulan	70
1.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	60 bulan	12 bulan	24 bulan	12 bulan	100	30 bulan	54 bulan	90
1.9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dn surat keluar (buah)	4 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2 kegiatan	4 Kegiatan	100
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	4 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2 kegiatan	4 Kegiatan	100
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	100	2 kegiatan	4 Kegiatan	100
<b>II</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	60 bulan	12 bulan	24 bulan	12 bulan	100	24 bulan	48 bulan	80
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	60 bulan	12 bulan	24 bulan	12 bulan	100	24 bulan	48 bulan	80

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100	8 unit	8 unit	100
2.3	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung / kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	3 kegiatan	5 kegiatan	100
2.4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	1 kegiatan	4 Kegiatan	100
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian Olah raga, batik ( stel)	60 bulan	12 bulan	24 bulan	24 bulan	100	5 bulan	41 bulan	60
<b>IV.</b>	<b>Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulan (1 s/d III) (Buku)	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	27 bulan	48 bulan	80

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<b>V.</b>	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan (orang)	60 bulan	12 bulan	24 bulan	24 bulan	100	5 bulan	41 bulan	60
<b>VI.</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase Keaktifan Siskamling</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
6.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Keamanan Lingkungan Pos Kamling	56 siskamling aktif	56 siskamling aktif	56 siskamling aktif	100	100	56 siskamling aktif	56 siskamling aktif	100
<b>VII.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100</b>
7.1	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	60 bulan	-	-	-	-	33 bulan	33 bulan	55
7.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	65 Desa	-	-	-	-	32 Desa	32 Desa	53

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
7.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	65 Desa	-	-	-	-	32 Desa	32 Desa	53
7.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	52 Desa	-	-	-	-	16 Desa	16 Desa	30
		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	60
7.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Proses Pelayanan PATEN	4 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50
		Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan : 1. KTP 2. KK 3. MUTASI	1 = 1.600 2 = 800 3 = 240	1 = 1.600 2 = 800 3 = 240	1 = 1.600 2 = 800 3 = 240	1 = 1.600 2 = 800 3 = 240	100	1 = 1.600 2 = 800 3 = 240	1 = 1.600 2 = 800 3 = 240	100

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngantang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Ngantang, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Ngantang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngantang Tahun 2018 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari capaian indikator kinerja Kecamatan Ngantang yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Ngantang Tahun 2016-2018, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Sedangkan Indikator Utama Kecamatan Ngantang Tahun 2019-2021 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan Perubahan Renstra Kecamatan Ngantang 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Kecamatan Ngantang;

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngantang dapat dilihat dari Tabel 2.2 sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>												
1.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			80 %	86 %	-	-	100 %	100 %	-	-	
2.	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan			100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	
	1. E-KTP			100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	
	2. KK			100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	
	3. Pindah Tempat (Mutasi)			100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	
3.	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			90 %	93 %	-	-	100 %	100 %	-	-	
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			-	-	80,12%	80,50%	-	-	80,12%	80,50%	
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			-	-	80 %	80 %	-	-	80 %	80 %	
<b>Indikator Kinerja Program dan Kegiatan</b>												







No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</b> Jumlah penyediaan pakaian batik/olahraga (Stel)			18 Stel	18 Stel	18 Stel	18 Stel	18 Stel	18 Stel	18 Stel	18 Stel	
9.	<b>Program : Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan Ikhtiisar Realisasi Kinerja SKPD			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulan (1 s/d III) (Buku)			12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	
10.	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Pendidikan dan Pelatihan Formal			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	<b>Presentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b> Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)			12 bulan	-	-	-	12 bulan	-	-	-	
11.	<b>Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b> Persentase pengendalian keamanan dan			100%	-	-	-	100%	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kenyamanan di lingkungan kantor (%)											
	<b>Pengendalian Keamanan Lingkungan</b> Terciptanya pengendalian keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor (OH)			365 OH	-	-	-	365 OH	-	-	-	
12.	<b>Program : Penataan Administrasi Kependudukan</b> Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	<b>Peningkatan Pelayanan Publik dalm Bidang Kependudukan</b> Terciptanya peningkatan pelayanan publik			365 OB	-	-	-	365 OB	-	-	-	
13.	<b>Program : Perencanaan Pembangunan Daerah</b> Persentase penyelenggaraan Musrenbang RKPD (%)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	<b>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</b> Tercapainya penyelenggaraan Musrenbang RKPD (Kegiatan)			1 paket	-	-	-	1 paket	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	<b>Program : Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b> Prosentase Desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan Desa			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	<b>Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes</b> Jumlah Desa yang tertib mengelola keuangan desa			13 Desa	-	-	-	13 Desa	-	-	-	
15.	<b>Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b> Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	<b>Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	
	<b>Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b> Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan			-	13 Desa	13 Desa	13 Desa	-	13 Desa	13 Desa	13 Desa	





No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Jumlah Infrastruktur Hasil Pembangunan Dana DD/ADD			-	13 Desa	13 Desa	13 Desa	-	13 Desa	13 Desa	13 Desa	
	<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b> Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (jenis, surat)			-	3 jenis  2.640 surat	3 jenis  2.640 surat	3 jenis  2.640 surat	-	3 jenis  2.640 surat	3 jenis  2.640 surat	3 jenis  2.640 surat	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Ngantang**

Permasalahan yang ada Kecamatan Ngantang dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai terutama di bidang pengelolaan IT;
- b. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat karena minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat OPD, padahal OPD adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada kepuasan masyarakat;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Ngantang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pemerintahan**

- 1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*
  - a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekamane KTP;
  - c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga

menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 satu kali.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Dengan adanya persediaan blangko e-KTP dan Operator Kec. Sudah mendapat Bimtek maka e-KTP dapat dicetak di Kecamatan

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

- a. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) sesuai keperuntukkannya;
- b. Mekanisme dan kelengkapan pendukung SPJ masih belum sesuai ketentuan.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah:

- a. Mengadakan bintek penyusuna APBDes yang berbasis kinerja sesuai hasil musdes dengan mengacu pada pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan yang ada;
- b. Memberikan bintek dan pendampingan dalam menyusun SPJ beserta kelengkapannya agar semua pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

#### **b. Bidang Pelayanan Publik**

- 1) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Ngantang dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
  - b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
  - c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Ngantang, antara lain:

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
- b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
- c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

2. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;

- a) Adanya SPPT ganda;
- b) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

**c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Masih adanya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat:**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayannya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

*Rekomendasi:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana  
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;

- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020**  
**Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					652.722.400,00						652.722.400,00		
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				652.722.400,00						652.722.400,00		
4.406	FUNGSI LAINNYA				652.722.400,00						652.722.400,00		
4.406.51	KECAMATAN NGANTANG				652.722.400,00						652.722.400,00		
4.406.51.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi ( % )</b>		<b>100%</b>	<b>92.069.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi ( % )</b>		<b>100%</b>	<b>88.937.000,00</b>		
4.406.51.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	36.500.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	36.500.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Pembinaan Karang taruna	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	625.000,00	APBD Kabupaten		Fasilitasi Pembinaan Karang taruna	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	625.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Kadarwis	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	375.000,00	APBD Kabupaten		Fasilitasi Kadarwis	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	375.000,00	APBD Kabupaten	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	1.100.000,00	APBD Kabupaten		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	1.100.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.01.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa	Kecamatan Ngantang	13 Desa	10.075.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa	Kecamatan Ngantang	13 Desa	4.950.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Ngantang	Kecamatan Ngantang	13 Desa	6.000.000,00	APBD Kabupaten		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Ngantang	Kecamatan Ngantang	13 Desa	5.850.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
		Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Kec. Ngantang	13 Desa	10.075.000,00	APBD Kabupaten		Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Kec. Ngantang	13 Desa	4.950.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
4.406.51.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	10.814.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	10.814.000,00	APBD Kabupaten	
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan : 1. KTP, 2. KK, 3. MUTASI	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	6.805.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan : 1. KTP, 2. KK, 3. MUTASI	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	9.613.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
		Jumlah Proses Pelayanan Paten	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	1.900.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah Proses Pelayanan Paten	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	6.360.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
<b>4.406.51.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>448.385.400,00</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>446.316.400,00</b>		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.51.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	4.800.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	4.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	40.800.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	44.200.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
4.406.51.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	24.627.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	25.127.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
4.406.51.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	75.722.400,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	70.718.400,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
4.406.51.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	32.780.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	76.820.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
4.406.51.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	21.315.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	27.765.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	5.250.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	5.250.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	212.935.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	161.480.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
4.406.51.02.09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	10.896.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	10.896.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.51.02.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	4.210.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	4.210.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	15.050.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	15.050.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.51.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>91.004.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>93.384.000,00</b>		
4.406.51.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	3.400.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	3.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	20.350.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	12.850.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
4.406.51.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	12.554.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	12.554.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.03.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	43.000.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	43.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.03.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	11.700.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	21.580.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		diadakan( jenis)						yang diadakan( jenis)					
<b>4.406.51.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.399.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.220.000,00</b>		
4.406.51.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	14.399.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	14.220.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
<b>4.406.51.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>7.500.000,00</b>		
4.406.51.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	4.500.000,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	7.500.000,00	APBD Kabupaten	Penyesuaian pagu dengan kebutuhan
<b>4.406.51.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>2.365.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>2.365.000,00</b>		
4.406.51.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	2.365.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	2.365.000,00	APBD Kabupaten	
<b>JUMLAH PROGRAM : 6 KEGIATAN : 26</b>					<b>652.722.400,00</b>		<b>JUMLAH PROGRAM : 6 KEGIATAN : 26</b>					<b>652.722.400,00</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngantang sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.

Uraian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019 dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		<b>NIHIL</b>			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Ngantang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ngantang**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan

dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP** Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Ngantang adalah sebagai berikut:

a. **Tujuan:**

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Ngantang.

b. **Sasaran:**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Ngantang.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Ngantang melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

**1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- f. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;

- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- i. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

## **2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor;
- e. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
- f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas.

## **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

## **5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu.

## **6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

Perumusan dan Rencana Program Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kecamatan Ngantang dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**  
**Kabupaten Malang**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					652.722.400,00				652.722.400,00
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				652.722.400,00				652.722.400,00
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				652.722.400,00				652.722.400,00
4.406.51	<b>KECAMATAN NGANTANG</b>				652.722.400,00				652.722.400,00
4.406.51.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi ( % )</b>		100%	92.069.000,00			100%	92.069.000,00
4.406.51.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	36.500.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	36.500.000,00
4.406.51.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten		13 Desa	2.600.000,00
		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten		13 Desa	2.600.000,00
		Fasilitasi Pembinaan Karang taruna	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	625.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	625.000,00
		Fasilitasi Kadarwis	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	375.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	375.000,00
		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	1.100.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	1.100.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan HIV di Sekolah sekolah							
4.406.51.01.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa	Kecamatan Ngantang	13 Desa	10.075.000,00	APBD Kabupaten		13 Desa	10.075.000,00
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Ngantang	Kecamatan Ngantang	13 Desa	6.000.000,00	APBD Kabupaten		13 Desa	6.000.000,00
		Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Kec. Ngantang	13 Desa	10.075.000,00	APBD Kabupaten		13 Desa	10.075.000,00
4.406.51.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	10.814.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	10.814.000,00
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten		13 Desa	2.600.000,00
4.406.51.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan : 1. KTP, 2. KK, 3. MUTASI	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	6.805.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	6.805.000,00
		Jumlah Proses Pelayanan Paten	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	1.900.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	1.900.000,00
<b>4.406.51.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>448.385.400,00</b>			<b>100%</b>	<b>448.385.400,00</b>
4.406.51.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	4.800.000,00	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	4.800.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daya Air dan Listrik	Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)							
4.406.51.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	40.800.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	40.800.000,00
4.406.51.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	24.627.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	24.627.000,00
4.406.51.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	75.722.400,00	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	75.722.400,00
4.406.51.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	32.780.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	32.780.000,00
4.406.51.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	21.315.000,00	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	21.315.000,00
4.406.51.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	5.250.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	5.250.000,00
4.406.51.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	212.935.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	212.935.000,00
4.406.51.02.09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	10.896.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	10.896.000,00
4.406.51.02.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	4.210.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	4.210.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.51.02.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	15.050.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	15.050.000,00
<b>4.406.51.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>91.004.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>91.004.000,00</b>
4.406.51.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	3.400.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	3.400.000,00
4.406.51.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	20.350.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	20.350.000,00
4.406.51.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	12.554.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	12.554.000,00
4.406.51.03.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	43.000.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	43.000.000,00
4.406.51.03.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	11.700.000,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	11.700.000,00
<b>4.406.51.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.399.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>14.399.000,00</b>
4.406.51.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	14.399.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	14.399.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.51.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		100%	4.500.000,00			100%	4.500.000,00
4.406.51.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	4.500.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	4.500.000,00
4.406.51.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		100%	2.365.000,00			100%	2.365.000,00
4.406.51.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	2.365.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.365.000,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGANTANG**

Rencana Kerja Kecamatan Ngantang serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang diuraikan pada Tabel 4.1 serta rencana kerja tahun 2020 dan rencana penyerapan anggaran per triwulan Kecamatan Ngantang diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ngantang Tahun 2020**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>652.722.400,00</b>		
<b>4</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>652.722.400,00</b>		
<b>4.406</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				<b>652.722.400,00</b>		
<b>4.406.51</b>	<b>KECAMATAN NGANTANG</b>				<b>652.722.400,00</b>		
<b>4.406.51.01</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi ( % )</b>		<b>100%</b>	<b>92.069.000,00</b>		
4.406.51.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	36.500.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Pembinaan Karang taruna	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	625.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Kadarwis	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	375.000,00	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	1.100.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.51.01.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Fasilitas pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa	Kecamatan Ngantang	13 Desa	10.075.000,00	APBD Kabupaten	
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Ngantang	Kecamatan Ngantang	13 Desa	6.000.000,00	APBD Kabupaten	
		Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Kec. Ngantang	13 Desa	10.075.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	10.814.000,00	APBD Kabupaten	
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	Kecamatan Ngantang	13 Desa	2.600.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan : 1. KTP, 2. KK, 3. MUTASI	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	6.805.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Proses Pelayanan Paten	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	1.900.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.51.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>448.385.400,00</b>		
4.406.51.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	4.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	40.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	24.627.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	75.722.400,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	32.780.000,00	APBD Kabupaten	



4.406.51.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	2 Kegiatan	21.315.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	5.250.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	212.935.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	10.896.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	4.210.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.02.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	15.050.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.51.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>91.004.000,00</b>		
4.406.51.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	3.400.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	20.350.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	12.554.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.03.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	43.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.51.03.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kecamatan Ngantang	1 Kegiatan	11.700.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.51.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.399.000,00</b>		

4.406.51.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	14.399.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.51.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>4.500.000,00</b>		
4.406.51.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	4.500.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.51.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>2.365.000,00</b>		
4.406.51.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	Kecamatan Ngantang	12 Bulan	2.365.000,00	APBD Kabupaten	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kerja Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan**  
**Kecamatan Ngantang Tahun 2020**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KET.
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi ( % )</b>	<b>100%</b>	<b>92.069.000,00</b>					
1.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	36.500.000,00	25	25	25	25	
1.2	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	13 Desa	2.600.000,00	30	30	40	0	
1.3		Fasilitasi Monitoring Rastra	13 Desa	2.600.000,00	30	30	40	0	
1.4		Fasilitasi Pembinaan Karang taruna	1 Kegiatan	625.000,00	30	30	40	0	
1.5		Fasilitasi Kadarwis	1 Kegiatan	375.000,00	30	30	40	0	
1.6		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	1 Kegiatan	1.100.000,00	30	30	40	0	
1.7	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa	13 Desa	10.075.000,00	25	25	25	25	
1.8		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Ngantang	13 Desa	6.000.000,00	25	25	25	25	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KET.
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.9		Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	13 Desa	10.075.000,00	25	25	25	25	
1.10	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	10.814.000,00	100	0	0	0	
1.11		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	13 Desa	2.600.000,00	80	5	10	5	
1.12	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan : 1. KTP, 2. KK, 3. MUTASI	1 Kegiatan	6.805.000,00	20	25	30	15	
1.13		Jumlah Proses Pelayanan Paten	1 Kegiatan	1.900.000,00	20	25	30	25	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>448.385.400,00</b>					
2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	2 Kegiatan	4.800.000,00	25	25	25	25	
2.2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Kegiatan	40.800.000,00	25	25	25	25	
2.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	24.627.000,00	25	25	25	25	
2.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	2 Kegiatan	75.722.400,00	25	25	25	25	
2.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1 Kegiatan	32.780.000,00	20	20	35	25	
2.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	2 Kegiatan	21.315.000,00	25	25	25	25	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KET.
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	5.250.000,00	25	25	25	25	
2.8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	212.935.000,00	25	25	25	25	
2.9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1 Kegiatan	10.896.000,00	25	25	25	25	
2.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Kegiatan	4.210.000,00	25	25	25	25	
2.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Kegiatan	15.050.000,00	30	20	20	30	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>91.004.000,00</b>					
3.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 Bulan	3.400.000,00	25	25	25	25	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	12 Bulan	20.350.000,00	25	25	25	25	
3.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 Bulan	12.554.000,00	25	25	25	25	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				KET.
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3.4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	1 Kegiatan	43.000.000,00	20	35	25	15	
3.5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 Kegiatan	11.700.000,00	20	35	25	15	
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>14.399.000,00</b>					
4.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	12 Bulan	14.399.000,00	0	50	30	20	
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.500.000,00</b>					
5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	12 Bulan	4.500.000,00	25	25	25	25	
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.365.000,00</b>					
6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	12 Bulan	2.365.000,00	0	0	0	100	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2016–2021.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ini terdapat 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**